

**SOSIALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM
MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN DAN STUNTING**

¹ Devit Bagus Indranika, ² Suryoto, ³ Anggara Setya Saputra, ⁴ Iin Piani, ⁵ Eka Kusumaningtias, ⁶ Lita Ningrum Afriani

^{1,2,3} Universitas Wijayakusuma, Purwokerto, Indonesia

^{4,5,6} Politeknik Madyathika, Indonesia

¹devit@unwiku.ac.id, ²suryoto@unwiku.ac.id, ³anggara@unwiku.ac.id,

⁴iin.piani@polmathik.ac.id, ⁵eka.kusumaningtias@polmathik.ac.id,

⁶lita.ningrum@polmathik.ac.id

ABSTRACT

Poverty reduction programs are part of the overall target of development programs. Various priority issues mandated include poverty alleviation and stunting reduction. It is the duty of stakeholders in villages and regions to carry out innovations with the aim of the success of the national program. The purpose of writing this service article is to provide a reference to stakeholders to produce a community empowerment program to reduce poverty and stunting rates in Banyumas Regency. The method was carried out using focus group discussion techniques. The results show that community empowerment in the context of poverty alleviation and handling stunting in Banyumas Regency is important. The importance of implementing poverty alleviation in villages is very large. Village Funds are used for basic infrastructure development and village community empowerment, which is an important step in reducing poverty in rural areas. Poverty alleviation strategies through community empowerment programs are also considered important, because they can increase the income and quality of life of village communities. In addition, efforts to eradicate village poverty are considered a priority to create a just and prosperous society. Studies also show that the effectiveness of Village Funds contributes to poverty alleviation and improving development performance in rural areas. Therefore, implementing poverty alleviation in villages has a significant impact in improving the welfare of rural communities. Regularly evaluating poverty alleviation programs is important to ensure their effectiveness and efficiency.

Keywords; pemberdayaan masyarakat desa, kemiskinan, *stunting*

A. PENDAHULUAN

Stunting dan kemiskinan merupakan dua persoalan besar yang dihadapi banyak daerah di Indonesia, khususnya Kabupaten Banyumas. Meskipun stunting merupakan indikasi terhambatnya pertumbuhan pada anak-anak, yang dapat berdampak pada perkembangan fisik dan mental mereka, kemiskinan berdampak pada kualitas hidup baik individu maupun masyarakat. Kedua masalah ini saling

berhubungan karena stunting pada masa kanak-kanak sering kali disebabkan oleh kemiskinan. Kemiskinan dapat menyebabkan stunting pada balita karena rumah tangga yang miskin tidak dapat memenuhi asupan gizi untuk anak-anak, sehingga anak-anak berisiko menderita stunting. Upaya penurunan kemiskinan juga diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka stunting. Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan dan program untuk menekan angka stunting dan menghapus kemiskinan ekstrem secara bersama-sama. Intervensi spesifik dan sensitif diperlukan untuk mengatasi kedua masalah ini secara bersamaan. Oleh karena itu, penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting perlu dilakukan secara komprehensif dan terkoordinasi

Pada tahun 2022 persentase penduduk miskin Kabupaten Banyumas mencapai 12,84% dengan jumlah penduduk miskin mencapai 220.470 jiwa dan garis kemiskinan Rp. 441.520 per kapita per bulan.

Gambar 1.

Penduduk miskin Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2022

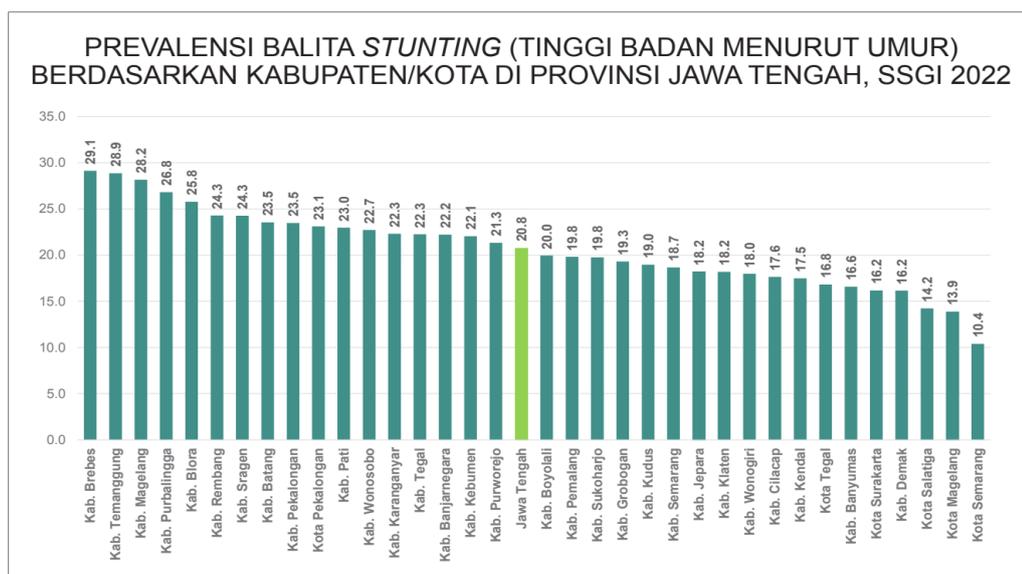
Kemiskinan	Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas		
	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	225,84	232,90	220,47
Persentase Penduduk Miskin (persen)	13,26	13,66	12,84
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	406 250,00	417 086,00	441 520,00

Sumber: BPS, 2023

Adapun prevalensi stunting di Kabupaten Banyumas berdasarkan SSGI 2022 mencapai 16,6. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 memberikan gambaran status gizi balita (stunting, wasting, underweight, overweight) dan determinannya meliputi indikator intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif menggunakan metode two stage stratified sampling secara potong lintang (cross-sectional).

Gambar 2.

Prevalensi Balita Stunting



Sumber: SSGI, 2022

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam penanganan kemiskinan dan penanggulangan stunting. Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu strategi kunci dalam mengatasi permasalahan ini. Pemberdayaan masyarakat mencakup upaya untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelompok masyarakat dalam mengelola sumber daya, mengakses layanan kesehatan dan pendidikan, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Desa merupakan unit terkecil organisasi pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Setiap desa mempunyai keunikan masing-masing baik dari segi karakteristik masyarakatnya, kondisi geografisnya, maupun potensinya. Pembangunan yang kini dimulai dari Desa merupakan upaya berkelanjutan Pemerintah Indonesia dengan memberikan hak kepada Desa. Adanya otonomi desa memunculkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur otonomi desa dan menuntut desa untuk mandiri.

Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan menyebutkan beberapa isu prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2024 adalah (1) Pengentasan kemiskinan ekstrem, (2) Intervensi percepatan eliminasi TBC, (3) Ketahanan pangan nabati dan hewani (4) Pencegahan narkoba, (5) Penurunan stunting, (6) Dana operasional pemerintah Desa, dan (7) Optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional. Selain itu Kemenko PMK juga menyatakan hal serupa diantaranya adalah ada tiga hal prioritas yang wajib diselesaikan dalam memanfaatkan Dana Desa. (1)

penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) desa, (2) penanganan kasus stunting (kekerdilan pada anak), dan (3) ketahanan pangan.

Dana Desa adalah bagian dari TKD (Transfer ke Daerah) yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa tahun 2024 telah ditetapkan sebesar 71 triliun rupiah dan dialokasikan kepada desa yang tersebar di 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia.

B. METODE

Metode yang digunakan adalah melalui FGD (*forum group discussion*) diantaranya adalah pemerintah daerah dan pemerintah desa. Metode FGD merupakan sebuah pendekatan yang umum digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif dalam penelitian sosial. FGD melibatkan diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah oleh sebuah kelompok untuk membahas suatu masalah tertentu dalam suasana yang santai dan dipandu oleh seorang moderator. Metode ini memiliki karakteristik utama yaitu menggunakan data interaksi yang dihasilkan dari diskusi antara peserta, dan dapat memberikan wawasan yang bernilai dan tidak dapat ditemukan melalui metode lain. FGD dalam pengabdian Masyarakat ini dilakukan melalui beberapa pihak organisasi perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Banyumas diantaranya adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang), Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan dan Perikanan, dan Dinas Kesehatan serta empat sasaran desa yaitu Desa Kracak dan Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang, Desa Windujaya Kecamatan Kedungbanteng, dan Desa Jipang Kecamatan Karanglewas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sosialisasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

Kebijakan publik adalah jawaban terhadap suatu masalah yang terjadi dalam masyarakat karena kebijakan publik sebagai upaya untuk memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu permasalahan. Thomas R Dye dalam Winarno

(2007; 16) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu. Kebijakan publik dapat dikatakan sebagai rangkaian tindakan atau kegiatan yang dicetuskan oleh individu, kelompok dalam masyarakat maupun pemerintah di dalam suatu wilayah tertentu untuk mengatasi dan memecahkan suatu permasalahan yang ada di masyarakat salah satunya adalah dalam pengentasan kemiskinan.

Strategi penanggulangan kemiskinan merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, strategi ini dibagi menjadi dua bagian besar

1. Melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan: Strategi ini melibatkan program perlindungan sosial dan kebijakan yang digunakan pemerintah untuk melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan
2. Pengembangan sistem jaminan sosial dan budaya usaha: Strategi ini melibatkan penduduk miskin memiliki strategi sendiri untuk menanggulangi kemiskinannya, seperti pinjam dari lembaga informal, menambah jam kerja, anggota keluarga ikut bekerja, merantau, atau berhemat.

Selain itu, strategi penanggulangan kemiskinan juga melibatkan beberapa tahapan pemulihan, seperti tahap bertahan (*survival*), pemulihan (*recovery*), dan transformasi (*transformation*). Program penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional dan harus disesuaikan dengan pola pemulihan dan tahapan penanganan krisis. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah juga menggunakan dua strategi utama diantaranya adalah:

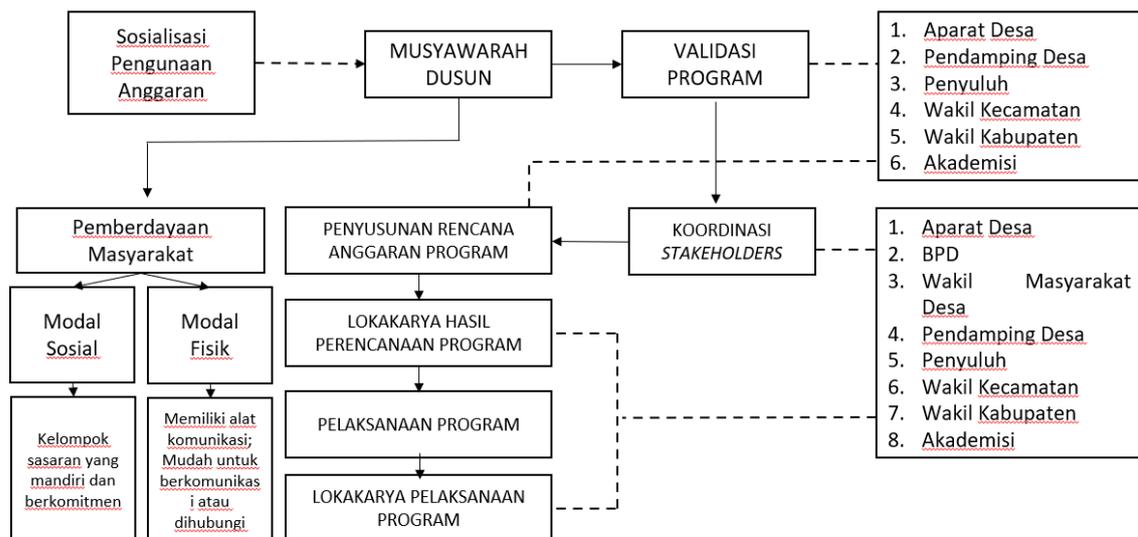
1. Mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan: Hal ini dilakukan melalui program perlindungan sosial dan kebijakan yang digunakan pemerintah untuk membantu kelompok miskin dan rentan.
2. Pemberdayaan dalam rangka peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan: Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan kelompok miskin dan rentan.

Dalam konteks daerah, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam wilayah.

Kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari fenomena politik anggaran. Anggaran publik, sebagai sebuah proses politik, merupakan cerminan dari niat dan tindakan pemerintah di masa lalu. Kekuasaan kelompok elit, terutama yang berada di jaringan legislatif, eksekutif, dan kelompok kepentingan yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan alokasi anggaran, tercermin dalam keputusan yang diambil mengenai alokasi anggaran. Di semua tingkat pemerintahan, proses penganggaran juga mengarah pada pembicaraan informal dan terselubung (Rubin, 2006 dan Provan, 2001). Oleh karena itu, standar akuntabilitas pemerintah diperlukan dalam proses anggaran publik. Meskipun prinsip-prinsip akuntabilitas dan keterbukaan dalam proses penganggaran publik telah diakui secara luas, penerapannya seringkali tidak merata (Mihaly Hogue, 2002; Wildavsky dan Caiden, 2012). Berikut dapat ditunjukkan model pengelolaan anggaran dalam pengentasan kemiskinan.

Gambar 3.

Manajemen Pengelolaan Anggaran Desa



Sumber: Adaptasi Sipayung dkk (2021)

Dana Desa adalah bagian dari TKD (Transfer ke Daerah) yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa tahun 2024 telah ditetapkan sebesar 71 triliun rupiah dan dialokasikan kepada desa yang tersebar di 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia.

7 (tujuh) isu prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2024 adalah (1) Pengentasan kemiskinan ekstrem, (2) Intervensi percepatan eliminasi TBC, (3) Ketahanan pangan nabati dan hewani (4) Pencegahan narkoba, (5) Penurunan stunting, (6) Dana operasional pemerintah Desa, dan (7) Optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan). Selain itu 3 (tiga) hal prioritas yang wajib diselesaikan dalam memanfaatkan Dana Desa. (1) penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) desa, (2) penanganan kasus stunting (kekerdilan pada anak), dan (3) ketahanan pangan (Kemenko PMK).

2. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Budidaya

Pemberdayaan masyarakat desa adalah suatu strategi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara menyeluruh. Tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat desa dalam mengambil peran meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk memperkuat kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal secara berkelanjutan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Program pemberdayaan masyarakat desa mencakup berbagai bidang, seperti ekonomi, kelembagaan, pemerintahan desa. Kegiatan FGD melalui sosialisasi pemberdayaan Masyarakat desa dapat ditunjukkan sebagai berikut.

Gambar 4.

Kegiatan FGD melalui Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa



a. Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran, ketrampilan, dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan sampah. Beberapa tujuan dari pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah antara lain adalah untuk mengurangi aktivitas pembakaran sampah plastik, meningkatkan kesehatan lingkungan dan masyarakat, melindungi sumber daya alam, melindungi fasilitas sosial ekonomi, dan menunjang pembangunan sektor strategis. Pendekatan pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat serta ketrampilan dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan sampah. Melalui pemberdayaan masyarakat, diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya pemilahan sampah, sehingga dapat dilibatkan dalam proses pengelolaan sampah secara aktif. Upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi peran pendampingan, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, peningkatan sarana persampahan, dan pengembangan akses terhadap peluang usaha.

Agustina et al. (2017) menyatakan bahwa jumlah sampah yang meningkat di desa dapat mengakibatkan pencemaran air, tanah, dan udara, dengan potensi dampak negatif terhadap keberlanjutan ekosistem desa. Hasil penelitian Yulianto et al. (2023) yang melakukan analisis jenis dan sumber sampah di desa, menunjukkan bahwa sebagian besar sampah berasal dari rumah tangga.

Pemahaman mendalam mengenai sumber dan jenis sampah ini menjadi penting untuk merancang solusi yang sesuai.

Elamin et al. (2018) menyatakan bahwa pengelolaan sampah di desa memiliki peran yang signifikan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Desa seringkali memiliki karakteristik unik, dan pengelolaan sampah yang tepat dapat membantu menjaga kebersihan dan kesehatan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan dan pemanfaatan sampah melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dalam konteks pengelolaan sampah, Penelitian oleh Shabrina et al. (2023) menyatakan bahwa partisipasi aktif masyarakat tidak hanya menciptakan kesadaran lingkungan tetapi juga mendorong tanggung jawab bersama terhadap kebersihan lingkungan.

Keterlibatan masyarakat desa penting dalam setiap tahap pengelolaan sampah, mulai dari pengumpulan, pemilahan, pengolahan, hingga pemanfaatan kembali sampah. Sebagai contoh, penelitian oleh Susilowati & Fauziah (2021) mengeksplorasi pemanfaatan sampah organik, khususnya limbah pertanian dan dapur. Pengolahan sampah organik sebagai pupuk organik dapat meningkatkan kesuburan tanah di lahan pertanian desa, meningkatkan hasil pertanian, dan pada gilirannya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sampah organik selain diolah menjadi kompos, juga dapat dimanfaatkan sebagai pakan maggot. Penelitian oleh Dewi & Sylvia (2022) menunjukkan bahwa pengolahan sampah organik menjadi pakan maggot memiliki potensi sebagai sumber protein yang murah dan berkualitas tinggi untuk pakan ternak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maggot yang diberi pakan dari sampah organik kaya akan protein, lemak, dan nutrisi esensial lainnya, menjadikannya sebagai alternatif potensial dalam pakan ternak.

Tantangan terkait sampah tidak hanya bersifat lingkungan, tetapi juga mencakup aspek ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan masyarakat dalam konteks ini tidak hanya akan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga dapat menciptakan peluang ekonomi baru dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Secara ekonomi, Penelitian oleh Romadoni et al. (2018) menunjukkan bahwa pengelolaan sampah

yang baik di desa dapat menciptakan peluang ekonomi baru. Proses daur ulang, pembuatan kerajinan dari bahan bekas, dan kegiatan ekonomi lainnya terkait sampah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Dalam konteks ini, penelitian, edukasi, dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci utama untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Penelitian oleh Zitri et al. (2022) menyoroti pentingnya peran pemerintah desa dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pengelolaan sampah. Keterlibatan pemerintah desa dalam pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah, penyuluhan, dan pelibatan masyarakat dapat menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sampah di tingkat desa.

b. Pemberdayaan Masyarakat melalui Budidaya Tanaman Sayur

Pemberdayaan masyarakat desa melalui pemanfaatan lahan pekarangan menjadi suatu pendekatan yang tepat dan berdampak positif, terutama dalam konteks peningkatan akses terhadap bahan pangan sayur dan meningkatkan ketahanan pangan. Desa, sebagai lumbung pangan dan pusat kehidupan masyarakat yang subur, memiliki potensi besar yang bisa dioptimalkan untuk menghasilkan tanaman sayur yang bervariasi dan bergizi.

Menurut Solihin et al. (2018) pekarangan memiliki peran sebagai lahan potensial untuk budidaya sayur di tingkat rumah tangga. Pekarangan memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk memulai budidaya sayur sendiri, memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, dan meningkatkan kemandirian pangan. Ekawati et al. (2021) juga menyatakan bahwa budidaya sayur di pekarangan tidak hanya memberikan akses yang lebih mudah tetapi juga memberikan kesempatan untuk menghasilkan berbagai jenis sayuran, meningkatkan variasi gizi dalam pola konsumsi masyarakat.

Pemanfaatan lahan pekarangan untuk budidaya tanaman sayur dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti penggunaan polybag atau sistem hidroponik wick. Metode ini tidak hanya memaksimalkan penggunaan lahan yang terbatas, tetapi juga memberikan alternatif yang inovatif dan efisien, terutama dalam menghadapi keterbatasan lahan. Melalui pendekatan ini, setiap meter

persegi lahan pekarangan dapat dijadikan ladang subur yang memproduksi tanaman sayur berkualitas.

Pemberdayaan masyarakat desa melibatkan pelatihan, pendampingan, dan penyediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan budidaya tanaman sayur secara efektif. Selain itu, melibatkan teknologi pertanian modern seperti hidroponik sistem wick dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air dan nutrisi tanaman, sehingga dapat menciptakan produksi yang berkelanjutan.

Dalam pandangan ini, upaya pemberdayaan masyarakat desa melalui pemanfaatan lahan pekarangan untuk budidaya tanaman sayur menggunakan polybag maupun sistem hidroponik wick diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara holistik. Langkah ini juga menciptakan fondasi yang kokoh menuju desa-desa yang mandiri, berkelanjutan, dan mampu memberikan kontribusi positif terhadap ketahanan pangan nasional.

Dalam konteks globalisasi dan perubahan iklim, ketahanan pangan menjadi tantangan serius. Oleh karena itu, menggalakkan budidaya tanaman sayur di lahan pekarangan di desa bukan hanya sebagai langkah adaptasi terhadap perubahan iklim tetapi juga sebagai upaya preventif untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar desa.

Model integrasi pertanian pekarangan direkomendasikan dalam penelitian Rauf et al., (2013). Pendekatan ini mencakup penggabungan budidaya tanaman sayur dengan pemeliharaan ternak kecil dan pengelolaan limbah organik, menciptakan sistem yang berkelanjutan dan memberikan manfaat ganda. Selain pertanian dan peternakan, pengelolaan limbah organik juga merupakan aspek penting dalam integrasi pertanian pekarangan. Daur ulang limbah organik dari ternak dan dapur menjadi pupuk kompos merupakan poin penting dalam menciptakan sistem yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Integrasi pertanian pekarangan memberikan potensi optimalisasi penggunaan lahan yang terbatas. Penggabungan tanaman sayur dan pemeliharaan ternak kecil dapat memaksimalkan hasil dari lahan pekarangan, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi risiko kerugian. Integrasi pertanian

pekarangan dapat mendukung cita-cita nasional untuk mencapai ketahanan pangan, selain itu juga dapat meningkatkan keseimbangan ekosistem.

Ketahanan pangan adalah suatu hal yang sangat esensial untuk memastikan kesejahteraan masyarakat, tanaman sayur sebagai sumber vitamin serta ternak sebagai sumber protein menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mencapai tujuan ini. Oleh karena itu, pemanfaatan lahan pekarangan di desa tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan pangan lokal tetapi juga membuka peluang untuk meningkatkan ekonomi lokal dan memberdayakan masyarakat.

c. Pemberdayaan Masyarakat melalui Budidaya Ternak Ayam

Pemberdayaan masyarakat melalui budidaya ternak ayam telah dilakukan melalui berbagai upaya, seperti pembinaan, pelatihan, dan penguatan kelembagaan. Gambaran umum pemberdayaan masyarakat pedesaan pada ternak ayam di berbagai daerah, yang meliputi aspek teknologi, penguatan kelembagaan, pelatihan, dan penyuluhan. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat melalui usaha budidaya ternak ayam.

d. Pemberdayaan Masyarakat melalui Budidaya Ikan Lele

Pemberdayaan masyarakat melalui budidaya ikan lele adalah suatu upaya untuk membantu masyarakat agar memiliki kekuatan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Budidaya ikan lele dapat dilakukan secara superintensif berbasis teknologi bioflok. Proses pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan budidaya ikan lele dilakukan dengan menciptakan iklim agar masyarakat dapat meningkatkan potensinya, memperkuat pengetahuan dan kemampuan masyarakat melalui pelatihan budidaya ikan lele, dan memberikan perlindungan.

D. SIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat desa dapat berperan penting dalam menurunkan angka kemiskinan dan stunting. Pemberdayaan masyarakat juga melibatkan peningkatan kesadaran tentang stunting dan keterampilan dalam merawat anak, serta pelatihan kesehatan dan gizi. Melalui berbagai inisiatif seperti pemberdayaan dalam

pemanfaatan sampah, budidaya tanaman sayur, budidaya ayam dan lele, diharapkan masyarakat desa dapat aktif terlibat dalam upaya pencegahan stunting dan kemiskinan, sehingga menciptakan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, N., Irianty, H., & Wahyudi, N. T. (2017). Hubungan Karakteristik Petugas Kebersihan Dengan Pengelolaan Sampah Di Puskesmas Kota Banjarbaru. *Jurnal Publikasi Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 4(2), 66–74. <https://doi.org/10.20527/jpkmi.v4i2.3843>
- Barnea, A and Amir Rubin. 2006. Corporate Social Responsibility as a Conflict between Shareholders, Electronic copy available at : http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=686606
- Dewi, R., & Sylvia, N. (2022). Pengelolaan Sampah Organik Untuk Produksi Maggot Sebagai Upaya Menekan Biaya Pakan Pada Petani Budidaya Ikan Air Tawar. *Jurnal Malikussaleh Mengabdikan*, 1(1), 11. <https://doi.org/10.29103/jmm.v1i1.5800>
- Ekawati, R., Saputri, L. H., Kusumawati, A., Paongan, L., & Ingesti, P. S. V. R. (2021). Optimalisasi Lahan Pekarangan dengan Budidaya Tanaman Sayuran sebagai Salah Satu Alternatif dalam Mencapai Strategi Kemandirian Pangan. *PRIMA: Journal of Community Empowering and Services*, 5(1), 19. <https://doi.org/10.20961/prima.v5i1.42397>
- Elamin, M. Z., Ilmi, K. N., Tahrirah, T., Zarnuzi, Y. A., Suci, Y. C., Rahmawati, D. R., Dwi P., D. M., Kusumaardhani, R., Rohmawati, R. A., Bhagaskara, P. A., & Nafisa, I. F. (2018). Analysis of Waste Management in The Village of Disanah, District of Sreseh Sampang, Madura. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 10(4), 368. <https://doi.org/10.20473/jkl.v10i4.2018.368-375>
- Hogye, Mihaly, 2000, Theoretical Approaches to Public Budgeting. Local Government and Public Service Reform Initiative.
- Provan, K. G., & Milward, H. B. (2001). Do networks really work? A framework for evaluating public-sector organizational networks. *Public Administration Review*, 61(4), 414 - 423.
- Rauf, A., Rahmawaty, & Said, D. B. T. J. (2013). SISTEM PERTANIAN TERPADU DI LAHAN PEKARANGAN MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN. *Jurnal Online Pertanian Tropik*, 1(1), 1–8.
- Romadoni, Tahyuddin, D., & Husin, A. (2018). Pembinaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Limbah Sampah di Bank Sampah Prabumulih. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 2(1), 31–39. <https://doi.org/10.15294/pls.v2i1.23446>

- Shabrina, A., Nuraini, K., & Naufal, A. (2023). Strategi Kampanye Kebersihan Lingkungan Oleh Pandawara Group Melalui Media Tiktok. *Prosiding Seminar Nasional Universitas Negeri Surabaya*, 1544–1556.
- Sipayung, dkk. 2021. Model Pengelolaan Dana Desa Dan Pemberdayaan Petani Di Desa Perbatasan Indonesia Dengan Timor Leste. *Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 19 No. 2, Hal: 135-148.
- Solihin, E., Sandrawati, A., & Kurniawan, W. (2018). Pemanfaatan pekarangan rumah untuk budidaya sayuran sebagai penyedia gizi sehat keluarga. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(8), 590–593.
- Susilowati, I., & Fauziah, H. N. (2021). PEMANFAATAN LIMBAH DAPUR SEBAGAI KOMPOS DAN PUPUK ORGANIK CAIR DI PONDOK MODERN AL-AMANAH SULAWESI TENGGARA. *Prosiding Pengabdian Masyarakat LPPM IAIN Ponorogo*, 1, 613–624.
- Wildavsky, Aaron dan Caiden, Naomi. 2012. *Dinamika Proses Politik Anggaran*. Yogyakarta. Universitas Proklamasi '45.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik Teori dan Konsep*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yulianto, G., Iswantari, A., & Wulandari, D. Y. (2023). Edukasi Pengolahan Sampah Organik Rumah Tangga dan Pembuatan Lubang Biopori (Education on Household Organic Waste Processing and Making Biopori Holes). *Jurnal PusatInovasi Masyarakat*, 5(1), 1–9.
- Zitri, I., Lestanata, Y., & Umami, R. (2022). Inovasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Sistem Zero Waste di Nusa Tenggara Barat Model Pentahelix The Zero Waste System Waste Management Policy Innovation in West Nusa Tenggara the Pentahelix Model. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(01), 107–119. <https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.335>